

Lampiran 1. Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian

**Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian**

**PERAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH**

**(Studi Kasus Pada SMP Negeri 7 Singaraja)**

Narasumber : Ketut Ngurah Yasa, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Singaraja  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022  
Waktu : 15.00 Wita  
Tempat : Rumah Pribadi Kepala Sekolah

Peneliti	: Apakah sejak awal terbentuknya sekolah, Desa Adat sudah ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)
Narasumber	: Jadi pihak desa adat memang sudah dari awal terbentuknya sekolah, desa adat sudah ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah. (Rabu, 24 Agustus 2022)
Peneliti	: Apakah ada beberapa konflik yang menjadi alasan Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)
Narasumber	: Jadi waktu berdirinya sekolah, sempat terjadi konflik yaitu ada beberapa masyarakat yang mengira jika desa adat sudah menjual tanah yang digunakan untuk membangun sekolah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Tetapi nyatanya tanah itu masih milik desa, tidak dijual sama sekali hanya bangunannya menjadi milik pemerintah daerah. Jadi karena ada konflik seperti itu, ada pro kontra, akhirnya disepakati desa adat ikut serta dalam pengembangan sekolah. Apapun kegiatan yang ada di sekolah itu diawasi oleh pihak desa adat. (Rabu, 24 Agustus 2022)
Peneliti	: Apakah kendala-kendala yang terjadi selama proses pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)

Narasumber : Kendala yang terjadi selama proses pengelolaan keuangan sekolah itu yang pertama dari segi pemerintahan. Jadi di dinas sering adanya perubahan-perubahan peraturan tergantung dari perubahan peraturan yang terjadi di pusat. Apabila ada perubahan maka pengelolaan keuangannya juga berubah dan untuk tahun sekarang pengelolaan keuangannya ada banyak aturan jadi lebih diperketat oleh pusat. Tidak sembarang bisa menggunakan dana sekolah dan harus ada kejelasan seperti SPJ dan lain sebagainya. Apabila mengacu dengan adanya keikutsertaan dari desa dalam pengelolaan keuangan sekolah, pihak sekolah mengalami kendala yaitu harus selalu update keuangan sekolah kepada pihak desa adat melalui rapat-rapat. Setiap bulan pasti ada rapat bulanan mungkin kalau dari pihak Desa bisa datang, pihak desa adat datang, kalau tidak ya hanya antar guru dan pegawai saja yang melaksanakan rapat rutin setiap bulannya. Biasanya di akhir tahun ada rapat untuk pembahasan RKAS dan untuk pelaporan keuangan selama satu tahun berjalan. (Rabu, 24 Agustus 2022)

Peneliti : Sebagai Kepala Sekolah, melihat kondisi sekolah seperti ini yang berbeda dari sekolah lainnya. Menurut Bapak, dampak positif dan negatif yang dirasakan selama ini dengan kondisi yang mana Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)

Narasumber :  
a. Jika dampak positifnya dari adanya desa adat ini, sekolah bisa dipantau oleh desa, kemudian yang kedua juga adanya sumbangsih dari desa untuk perkembangan sekolah. Berarti pihak desa mau ikut serta dalam pengembangan desanya sendiri. Apabila sekolah ini bisa berkembang dengan baik, maka hal tersebut juga akan berdampak positif pada perkembangan desa itu sendiri karena

sebagian besar siswa- siswinya adalah warga desa Alasangker.

- b. Kalau untuk dampak negatifnya, dengan adanya keikutsertaan desa adat ini, ada beberapa peraturan dari desa adat itu sendiri dan ada beberapa hal tidak diperbolehkan oleh desa adat yang dilaksanakan di sekolah seperti pembukaan kantin. Dengan adanya peraturan tersebut, sekolah tidak memiliki pemasukan dana selain dana BOS. Hal tersebut menyebabkan terjadi kontra di antara pegawai dan guru dengan desa adat.
- c. Nah dengan adanya peraturan yang tidak memperbolehkan sekolah membuka kantin ataupun koperasi, pihak sekolah menjadi tidak memiliki dana pemasukan. Ada beberapa pengeluaran yang tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS, contohnya seperti dana untuk persembahyangan. Hal tersebut terkadang menyebabkan kontra di antara guru dan pegawai, karena kita hidup di Bali pastinya mengenal adanya rahina seperti Purnama Tilem belum lagi Saraswati, Galungan, Kuningan dan lain sebagainya. Beberapa rahinan yang rutin dilaksanakan di sekolah seperti Purnama Tilem, Saraswati dan sekolah juga memiliki rahinan rahinan besar khusus untuk di sekolah. Karena sekolah tidak memiliki dana masuk selain dari dana BOS, terkadang hal tersebut menyebabkan ketika akan datangnya rahina, menjadi masalah di antara di antara guru dan pegawai, karena guru dan pegawai gajinya hanya cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. Apabila ada guru dan pegawai yang tidak memiliki dana lebih untuk menyumbang dalam pembuatan Banten, itu yang menjadi kendala dan dampak negatif dari adanya keikutsertaan

desa adat dalam pengelolaan keuangan sekolah.

- d. Di satu sisi memang desa adat pernah menjanjikan akan memberikan dana apabila sekolah meminta dana kepada desa seperti untuk rahinan atau lain sebagainya namun hal tersebut juga terkadang tidak dipenuhi oleh desa melihat dari anggaran yang ada di desa adat itu sendiri. (Rabu, 24 Agustus 2022)

Peneliti : Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu terkait dampak dari keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah terhadap *Good Governance* SMP Negeri 7 Singaraja? Dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi staregis. (Rabu, 24 Agustus 2022)

Narasumber : Pada dasarnya keterlibatan Desa Adat ini berdampak sangat besar dalam mewujudkan tata kelola yang baik bagi SMP Negeri 7 Singaraja. Partisipasi masyarakat menjadi besar dalam pengawasan, transparansi sudah jelas menjadi sangat tinggi, SMP Negeri 7 Singaraja sangat menunjukkan kepedulian kepada *stakeholder* dengan memperhatikan semua masukkan dari orang tua siswa dan termasuk didalamnya Desa Adat. Kesetaraan dalam pengelolaan keuangan juga tinggi, karena tidak hanya memperhatikan orang tua siswa, Desa Adat juga diberikan ruang untuk memberikan aspirasi dan bahkan ikut serta dalam rangkaian pengelolaan keuangan, sehingga kesetaraan sangat dipelihara. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan juga kami laksanakan setiap tahun. Sehingga tata kelola SMP Negeri 7 Singaraja sampai saat ini dapat dikatakan sangat baik, yang terbukti tidak pernah ada kasus keuangan di sekolah ini karena pengawasannya berlapis. (Rabu, 24 Agustus 2022)

**Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian**  
**PERAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH**  
**(Studi Kasus Pada SMP Negeri 7 Singaraja)**

Narasumber : Nyoman Haritu, S.Pd.  
Jabatan : Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022  
Waktu : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Kantor SMP Negeri 7 Singaraja

Peneliti	: Seperti yang kita ketahui, proses akuntansi dalam keuangan sekolah pada umumnya semua sama. Mulai dari penganggaran sampai tahap pelaporan dan pengawasan. Menurut Bapak/Ibu, apa saja peran Desa Adat dalam proses tersebut? (Rabu, 24 Agustus 2022)
Narasumber	: Peran Desa Adat terletak pada proses penganggaran dan pengawasan. Pada proses akuntansi dalam keuangan sekolah, desa adat ikut serta dalam penganggaran. Saat penganggaran, pihak sekolah menampung aspirasi Desa Adat untuk dimasukkan kedalam RKAS. Desa adat juga ikut serta untuk mengawasi realisasi anggaran dan memeriksa kesesuaian RKAS dan laporan keuangan. (Rabu, 24 Agustus 2022)
Peneliti	: Apakah kendala-kendala yang terjadi selama proses pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)
Narasumber	: Kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan sekolah cukup banyak. Berkaitan dengan keterlibatan Desa Adat, pengelolaan menjadi lebih kompleks karena segala sesuatu harus disampaikan kepada Desa Adat, termasuk juga perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi. Semua hal itu harus dikomunikasikan. (Rabu, 24 Agustus 2022)

Peneliti	: Sebagai Bendahara dana BOS, melihat kondisi sekolah seperti ini yang berbeda dari sekolah lainnya. Menurut Bapak atau Ibu, dampak positif dan negatif yang dirasakan selama ini dengan kondisi yang mana Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)
Narasumber	: Dampak positif dan negative itu selalu berjalan beriringan. Dampak positifnya terkait pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran karena didalamnya melibatkan berbagai jenis <i>stakeholder</i> , termasuk Desa Adat yang biasanya sangat jarang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dampak negatifnya berupa proses pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks dan panjang karena segala sesuatu yang dianggap signifikan harus dikomunikasikan dengan pihak Desa Adat. (Rabu, 24 Agustus 2022)
Peneliti	: Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu terkait dampak dari keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah terhadap <i>Good Governance</i> SMP Negeri 7 Singaraja? Dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada <i>stakeholder</i> , berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi staregis. (Rabu, 24 Agustus 2022)
Narasumber	: a. Nah terkait dampak dari keikutsertaan desa adat dalam pengelolaan keuangan sekolah terhadap <i>good governance</i> di SMP 7 Singaraja. Yang pertama itu partisipasi masyarakat jadi melihat keikutsertaan desa adat terhadap pengelolaan keuangan sekolah ini jadi masyarakat itu merasa senang bahwa adanya simpati dari desa adat itu sendiri terhadap sekolah yang sudah mereka usahakan pembangunannya seperti itu dan ini juga membuat

masyarakat menjadi tenang bahwa dana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada sekolah itu dapat dikelola dengan baik dan disana terdapat transparansi antara pemerintah sekolah dan desa adat itu sendiri. Kedua mengenai tegaknya supremasi hukum jika dilihat dari awal berdirinya sekolah sampai saat ini belum pernah ada yang namanya tindakan-tindakan kriminal ataupun tindakan-tindakan yang melenceng dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti adanya Korupsi atau lain sebagainya. Keadilan di sekolah ini masih ditegakkan dengan baik dan kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa, kita tidak tahu nanti akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pihak desa dan pihak sekolah sudah memiliki beberapa sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang mungkin nantinya melakukan tindakan-tindakan diluar peraturan. Nah untuk yang ketiga transparansi jadi adanya keikutsertaan dari desa adat membangun keinginan dari kepala sekolah bendahara maupun dari pembantu bendahara Bos untuk dengan cepat menyelesaikan laporan laporan keuangan yang nantinya akan dicek oleh pemerintah seperti nanti ada rekonsiliasi di dinas setiap semester. Keikutsertaan desa adat memicu agar pihak sekolah tidak bermain dalam pengelolaan keuangan dan menggunakan dana BOS ataupun dana lainnya dengan mengacu pada RKAS yang sudah dibuat di awal semester.

- b. Yang selanjutnya itu ada peduli stakeholder jadi dengan adanya keikutsertaan desa adat dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMP Negeri 7 Singaraja, menumbuhkan rasa peduli kita terhadap seluruh stakeholder ataupun seluruh pihak ketiga yang

bekerjasama dengan sekolah. Tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang tidak bekerjasama pun apabila mereka datang ke sekolah, kita harus melayaninya dengan baik, karena itu juga membangun citra dari sekolah. Karena adanya keikutsertaan dari desa adat, tentunya sekolah itu dilihat juga dari citra desa itu sendiri. Apabila pelayanan di sekolah tidak baik, maka hal tersebut juga akan mencoreng nama desa adat itu sendiri, karena nama baik sekolah tidak bisa dipisahkan dengan nama baik desa.

- c. Untuk kesetaraan jadi semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama demi kesejahteraan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun desa adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah, hal ini tidak akan berdampak pada proses pendidikan, karena tetap keuangan yang dimiliki oleh sekolah itu untuk seluruh peserta didik SMP Negeri 7 Singaraja. Nah, untuk efektivitas dan efisiensi, jadi keikutsertaan desa adat juga berdampak sangat positif untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan di sekolah SMP Negeri 7 Singaraja. Kepala sekolah, bendahara, dan pembantu bendahara Bos memiliki tingkat keinginan untuk menyelesaikan laporan keuangan dan efektivitas serta efisiensi dalam pembuatan laporan keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, yang saya tahu itu mungkin ada yang menunda-nunda dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan adanya keikutsertaan desa adat ini juga sangat membantu tingkat akuntabilitas laporan keuangan sekolah. Setiap semesternya itu akan dibuatkan SPJ, jadi setiap bulan itu ada SPJ bulanan namanya dan nantinya akan diperiksa



setiap semester. Setiap enam bulan sekali ada pemeriksaan SPJ keuangan, sudah sampai mana keuangan sekolah itu terealisasi dan apakah sudah sesuai dengan RKAS seperti itu. (Rabu, 24 Agustus 2022)



**Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian**  
**PERAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**SEKOLAH**

**(Studi Kasus Pada SMP Negeri 7 Singaraja)**

Narasumber : Luh Putu Linda Ary Noviani, S.Pd.  
Jabatan : Pembantu Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022  
Waktu : 14.00 Wita  
Tempat : Ruang Kantor SMP Negeri 7 Singaraja

Peneliti : Seperti yang kita ketahui, proses akuntansi dalam keuangan sekolah pada umumnya semua sama. Mulai dari penganggaran sampai tahap pelaporan dan pengawasan. Menurut Bapak/Ibu, apa saja peran Desa Adat dalam proses tersebut? (Rabu, 24 Agustus 2022)

Narasumber : Dalam proses akuntansi dalam keuangan sekolah, desa adat ikut serta dalam penganggaran. Pihak sekolah melakukan penganggaran itu kan dituangkan dalam RKAS. Jadi sebelum membuat RKAS kepala sekolah tentunya selalu menampung apa saja yang menjadi pikiran dari desa adat itu sendiri, jadi sebelum membuat RKAS, kepala sekolah akan melaksanakan rapat dengan kepala desa adat di mana nanti akan tertuang saran-saran dari desa adat untuk 1 tahun kedepan dalam pembuatan RKAS, kegiatan apa saja yang disarankan oleh desa adat itu sendiri. Desa adat ikut serta dalam pengawasan bagaimana terealisasinya kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam RKAS apakah semua sudah terealisasi, apakah RKAS dan laporan keuangan sudah sama dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin ditambah atau dikurangi pada saat berjalannya proses Pendidikan, contohnya seperti kegiatan lomba-lomba karena pihak sekolah tidak mungkin tahu di awal tahun lomba-lomba apa saja yang akan dilaksanakan oleh

	<p>beberapa instansi pemerintahan ataupun dari instansi lainnya. Jadi sekolah tidak tahu lomba apa saja yang akan diikuti nantinya, nah hal tersebut yang paling sering menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan di luar perencanaan dalam RKAS dan itu kemungkinan akan menyebabkan perubahan RKAS atau yang biasanya jika di Dinas Pendidikan disebut dengan pergeseran RKAS. (Rabu, 24 Agustus 2022)</p>
Peneliti	<p>: Apakah kendala-kendala yang terjadi selama proses pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)</p>
Narasumber	<p>a. Kalau sebagai pembantu bendahara bos, kendala-kendala dari pengelolaan keuangan yang mungkin dirasakan seperti saya walaupun sebagai orang keuangan atau orang akuntansi yang setidaknya tahu tentang keuangan. Pengelolaan keuangan ataupun pelaporan pelaporan yang ada di sekolah itu mungkin berbeda dengan yang kita pelajari di masa-masa kuliah. Jadi kalau di masa kuliah kita lebih belajar ke pengelolaan keuangan bisnis pengelolaan keuangan departemen perhotelan dan lain sebagainya, jadi kita tidak pernah belajar yang namanya keuangan di sektor sekolah di pendidikan walaupun sekolah termasuk ke dalam sektor public, hanya saja dipelajari secara umum bagaimana pengelolaan keuangan di sektor public. Tetapi setelah kita melaksanakan bagaimana itu pengelolaan keuangan dana BOS, bagaimana itu pelaporannya, apa saja SPJ nya, saya mengalami beberapa kendala misalnya kalau kita di perkuliahan termasuk aset tetap tapi ternyata dalam praktiknya di sector Pendidikan itu tidak termasuk ke aset tetap. Terkadang di sana juga menjadi kendala, karena di Dinas Pendidikan itu sendiri memiliki daftar-daftar mana yang termasuk aset tetap dan mana yang bukan aset tetap.</p> <p>b. Jadi dinas pendidikan itu memiliki kriteria nya sendiri. Kendala juga ada di aplikasi. Sekarang ada yang namanya aplikasi arkas yang menjadi kendala pengelolaan keuangan</p>

sekolah ataupun pelaporan keuangan sekolah karena dengan adanya arkas ini kita menjadi sedikit kesusahan. Sebelum ada aplikasi ini, sekolah masih bisa melaksanakan perubahan-perubahan di tengah jalan semisal selama 1 tahun, pada bulan tertentu ada kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan itu bisa kita laksanakan.

- c. Setelah tahun ini sekitar 3 bulan di Tahun 2022 ini ada beberapa perubahan dari dinas kita menggunakan aplikasi yang namanya Arkas. Sehingga pihak sekolah benar-benar harus merencanakan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan matang dan tidak bisa melaksanakan perubahan di tengah jalan. Apabila nantinya akan ada kegiatan-kegiatan lain mungkin itu bisa di pending untuk dilaksanakan di tahun berikutnya dan harus dituangkan dalam RKAS tahun berikutnya. Tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan mendadak seperti sebelum-sebelumnya, itu menjadi kendala salah satu kendala pengelolaan keuangan untuk tahun ini. Hal ini juga menjadi kendala pihak sekolah untuk mensosialisasikan juga kepada pihak desa adat bahwa beberapa hal ataupun beberapa kegiatan yang mungkin kemarin bisa dilaksanakan dan sekarang itu untuk dana BOS tidak diperbolehkan. Seperti contohnya jika sebelum-sebelumnya pihak sekolah bisa membayar honor untuk orang-orang yang menulis ijazah atau kita bisa membeli map untuk ijazah atau kita bisa membeli map buku, map untuk raport siswa. Tahun ini dari pemerintah pusat memberikan peraturan, hal tersebut semuanya dihapuskan tidak diperbolehkan membeli ataupun memberikan honor untuk penulisan ijazah menggunakan dana BOS sekolah. Jadi hal tersebut juga menjadi salah satu kendala pada saat kita mengelola keuangan sekolah karena pemasukan lain

	<p>seperti dari kantin dan koperasi tidak dimiliki oleh SMP Negeri 7 Singaraja. (Rabu, 24 Agustus 2022)</p>
Peneliti	<p>: Sebagai pembantu Bendahara dana BOS, melihat kondisi sekolah seperti ini yang berbeda dari sekolah lainnya. Menurut Bapak atau Ibu, dampak positif dan negatif yang dirasakan selama ini dengan kondisi yang mana Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah? (Rabu, 24 Agustus 2022)</p>
Narasumber	<p>: Dampak positif dari keterlibatan desa adat, pengawasan terhadap sekolah menjadi lebih baik sehingga sekolah menjadi semakin dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang lain. Dampak negatifnya, ada beberapa hal tidak diperbolehkan oleh desa adat seperti pembukaan kantin sehingga sekolah tidak memiliki pemasukan dana selain dana BOS. (Rabu, 24 Agustus 2022)</p>
Peneliti	<p>: Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu terkait dampak dari keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah terhadap <i>Good Governance</i> SMP Negeri 7 Singaraja? Dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada <i>stakeholder</i>, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi staregis. (Rabu, 24 Agustus 2022)</p>
Narasumber	<p>: Keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejauh ini belum ada keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keterlibatan Desa Adat ini turut menjamin pengelolaan keuangan yang bersih dan tepat sasaran serta menunjukkan bahwa SMP Negeri 7 Singaraja sudah berkomitmen untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, transparansi, kepedulian kepada <i>stakeholder</i>, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Walaupun ada banyak dampak positif dan negative dari keterlibatan Desa</p>

Adat, akan tetapi hal ini telah menunjukkan bahwa SMP Negeri 7 Singaraja memiliki *Good Governance* yang baik, bahkan perlu dijadikan contoh oleh sekolah lain. (Rabu, 24 Agustus 2022)



## Lampiran 2. Foto Kegiatan Pengumpulan Data



Peneliti dan Kepala SMP Negeri 7 Singaraja



Peneliti dan Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja

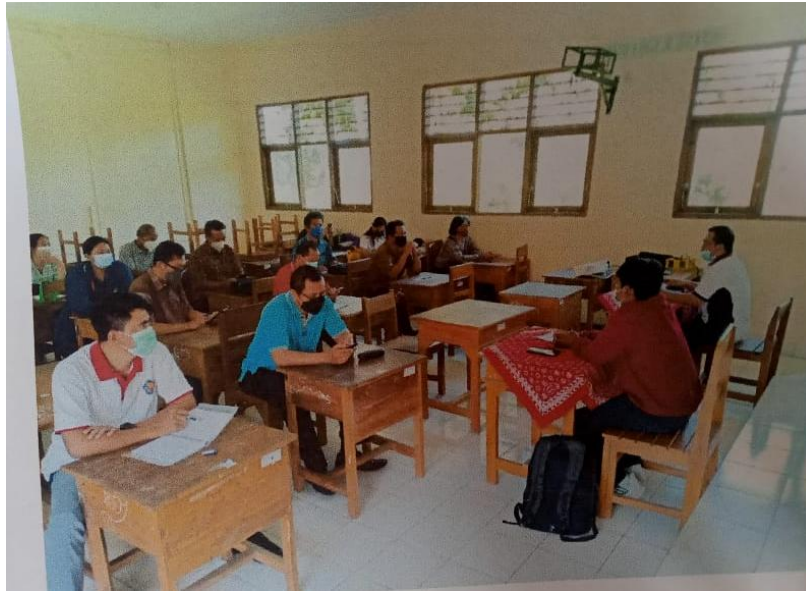


Peneliti dan Pembantu Bendahara BOS SMP Negeri 7  
Singaraja





**Lampiran 3. Foto Berkegiatan**





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**SMP NEGERI 7 SINGARAJA**  
Desa Alasangker, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng  
Kode Pos. 81119 Telpn (0362)3305295  
Email [smpnegeri7singaraja@yahoo.com](mailto:smpnegeri7singaraja@yahoo.com)



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.2/156.1 / SMPN.7 SGR /DP.1 /VIII/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 7 Singaraja :

Nama : Ketut Ngurah Yasa, S.Pd.,M.Pd.

NIP : 19690125 199802 1 002

Jabatan : Kepala SMP Negeri 7 Singaraja

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:


Nama : Luh Putu Pertiwi Gayatri Para Premayanti, S.E

NIM : 2029141002

Jurusan : S2 Akuntansi

Memang benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di SMP Negeri 7 Singaraja, yang di laksanakan pertanggal 24 Agustus 2022.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 29 Agustus 2022  
Kepala SMP Negeri 7 Singaraja  
  
Ketut Ngurah Yasa, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Tk.1/IVb  
Nip 19690125 199802 1 002

